ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah belum berbasis nilai keadilan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah saat ini. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah harus berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif.* Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah *deskriptif analisis*. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan di atas melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini adalah Penyebab dari perlindungan hukum bagi calon Jemaah Haji dan Umrah belum berbasis keadilan di Indonesia adalah pada persoalan Nilai . Dimaksud dengan persoalan nilai yaitu belum adanya pemahaman baik atau belum adanya pemahaman yang sistemik terhadap substansi Keadilan pada Undang Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Undang-Undang lain yang berkaitan . Keadaan belum adanya Pemahaman terhadap Substansi Keadilan sehingga menimbulkan kelemahan-kelamahan struktur hukum yang menangani terkait permasalahan perlindungan hukum . Perlindungan hukum merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan warga Negara dapat merasakan hak tersedia dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang adaptif dan flekibel, serta prediktif dan antisipatif. Seperti kondisi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah Indonesia saat ini, terlihat jelas berdasarkan fakta bahwa perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji Dan Umrah Belum Berbasis Keadilan. Dimaksudkan dengan berbasis keadilan yaitu berbasis pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia Manifestasi atau wujud nyata dari jiwa bangsa itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dan yang tidak kalah penting adalah berkeadilan menurut Syariat Islam dan Pancasila. Rekonstruksi bahwa hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada setiap warga negara serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tata cara formal (hukum) maupun secara non formal. Sebagaimana dalam teori perlindungan hukum yaitu Membentuk sebuah aturan (*by giving regulation*), dengan tujuan agar Memfasilitasi atau memberikan hak dan kewajiban , adanya jaminan terhadap subyek hukum .juga menegakkan sebuah aturan (*by law enorcement*), dengan cara, Pencegahan yang di lakukan pelanggaran hak konsumen, lewat perizinan dan pengawasan melalui Hukum Adminstrai Negara (HAN), Pencegahan adanya pelanggaraan undang-undang perlindungan konsumen, lewat sanksi pidana dan menjatuhkan hukuman, melalui Hukum Pidana. Dan Pemulihan atas Hak-hak, dengan cara memberikan sanksi untuk membayar kompensasi atau mengganti rugi, melalui Hukum Perdata .

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Nilai Keadilan

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) To find out and analyze legal protection for prospective pilgrims and umrah not based on justice values. 2) To find out and analyze the construction of legal protection for prospective pilgrims and umrah at this time. 3) To find out and analyze the reconstruction of legal protection for prospective pilgrims and umrah must be based on the value of justice.

The approach method used is normative juridical. The type of legal research used is descriptive analysis. The approach applied to discuss the above problems through a statute approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach and a conceptual approach.

The results of this study are the cause of legal protection for prospective pilgrims and Umrah not based on justice in Indonesia is the issue of Value. Referred to as the issue of values, namely the lack of a good understanding or lack of a systematic understanding of the substance of Justice in the Act of Hajj and Umrah, as well as other relevant laws. The lack of understanding of the substance of justice that causes weaknesses in the legal structure that deals with issues of legal protection. Legal protection is part of the rights granted by the State to its citizens. The law overshadows the rights possessed by every human being when harmed by others. So that through this protection all levels of citizens can feel the available rights of applicable law. Laws can be aimed at realizing adaptive and flexible protection, as well as predictive and anticipatory measures. Like the condition of legal protection for prospective pilgrims and umrah in Indonesia at this time, it is clearly seen based on the fact that legal protection for prospective pilgrims and Umrah is not yet based on justice. Intended on the basis of justice which is based on the soul of the nation (Volksgeist) Indonesia Manifestation or tangible manifestation of the soul of the nation is Law No. 8 of 2019 concerning the organization of the Pilgrimage and Umrah, Law No. 8 of 2009 concerning Consumer Protection and no less important is fair according to the Islamic Sharia and Pancasila. Reconstruction that the law serves to provide justice to every citizen as well as a means to realize prosperity for all people. entitled to get compensation for the suffering he suffered; it is possible to obtain compensation through formal (legal) and informal procedures. As in the theory of legal protection that is forming a rule (by giving regulation), with the aim that to facilitate or provide rights and obligations, there is a guarantee against legal subjects. consumers, through licensing and supervision through the State Administrative Law (HAN), Prevention of violations of consumer protection laws, through criminal sanctions and sentencing, through Criminal Law. And the restoration of rights, by providing sanctions to pay compensation or compensation, through the Civil Code.

Keywords: Reconstruction, Legal Protection, Value of Justice